

**PENGUMUMAN****LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA SALATIGA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SILACHUDIN
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 96988

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 67.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 356 m2/112 m2 di DUSUN GRABAGAN RT. 001 RW. 0002 Kode Pos. 50777, [unknown], WARISAN Rp. 57.000.000
2. Tanah Seluas 1432 m2 di DUSUN GRABAGAN RT. RW. Kode Pos. 50777, [unknown], HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 88.500.000

1. MOTOR, YAMAHA JUPITER Z SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
4. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
5. MOTOR, HONDA SPM SOLO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
6. MOTOR, HONDA AIF02N36M1 A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 1.400.000

D. SURAT BERTARAF

Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 65.244.855

F. HARTA LAINNYA

Rp. ---



Sub Total	Rp.	222.144.855
III. HUTANG	Rp.	25.504.700
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	196.640.155

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LINGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **25 Februari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.